Pengaruh Karakteristik Pemimpin Korea Selatan terhadap Implementasi Sunshine Policy Tahun 1998-2010

Vidyana Putri – 071012078

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Inter – Korean relations were broke for a half century began to improve since the government of Kim Dae Jung applied Sunshine Policy as South Korean's foreign policy strategy toward North Korea. However, the South Korean Unification Ministry officially declared the Sunshine Policy as failure in 2010. This research is an explanatory research that aims to determine the effect of the three leader's characteristics of South Korea to the implementation of Sunshine Policy. The different characteristics possessed by Kim Do Jun, the Roh Moo Hyun, and Lee Myung Bak resulting different implementation of Sunshine Policy. The implementation differences shown through trust and distrust of North Korea. Distrust emerged as South Korea considers North Korea has conducted an exploitation during the implementation of Sunshine policy and therefore Sunshine Policy was declared a failure in 2010.

Keywords: *Sunshine Policy, Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun, Lee Myung Bak, characteristics, implementation.*

Hubungan antar Korea yang terputus selama lebih dari setengah abad mulai membaik sejak pemerintah Kim Dae Jung menerapkan Sunshine Policy sebagai strategi kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara. Namun dibalik kesuksesan Sunshine Policy, justru Sunshine Policy dinyatakan gagal dalam laporan resmi unifikasi korea yang diterbitkan oleh Kementrian Unifikasi Korea Selatan pada tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik dari pemimpin ketiga pemimpin Korea Selatan terhadap implementasi dari Sunshine Policy. Karakteristik yang dimiliki oleh Kim Do Jun, Roh Moo Hyun, dan Lee Myung Bak berperan penting dalam Sunshine Policy sehingga Korea Selatan mengimplementasikan Sunshine Policy secara berbeda pula. Perbedaan implementasi tersebut ditunjukkan melalui kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap Korea Utara. Rasa ketidakpercayaan muncul karena Korea Selatan menganggap Korea Utara telah melakukan eksploitasi selama Sunshine Policy dijalankan, dan oleh karena itu Sunshine Policy dinyatakan gagal pada tahun 2010.

Kata kunci: *Sunshine Policy, Kim Dae Jung, Roh Moo Hyun, Lee Myung Bak, karakteristik, implementasi.*

Korea Selatan telah melakukan sejumlah upaya untuk melakukan rekonsiliasi dengan Korea Utara sejak Perang Korea berakhir. Korea Selatan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan unifikasi kepada Korea Utara dari periode ke periode. Dimulai pada tahun 1973, Presiden Korea Selatan Park Chung Hee mencetuskan *Special Foreign Policy Statement Regarding Peace and Unification*. Presiden selanjutnya, Chun Doo Wan mengeluarkan *New Peaceful Unification Formula*. Melalui kebijakan ini, Chun Doo Wan mengusulkan pertukaran delegasi tingkat tinggi dalam sebuah pertemuan konferensi tingkat tinggi antara pemimpin kedua Korea.

Pada masa pemeritahan Roh Tae Woo, tercetuslah konsep Korea *Commonwealth Unification* pada tahun 1989 yang berisi rencana unifikasi secara bertahap yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian, dan demokrasi. Konsep tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Kim Young Sam yang mengusulkan *Four Party Talk* antara Amerika Serikat, Cina, dan kedua Korea, sebagai sarana untuk membawa Korea Utara ke dalam diskusi bersama Korea Selatan. Pada tahun 1994, Kim Young Sam mengungkapkan bahwa masalah Korea Utara adalah masalah bagi Korea Selatan juga dan untuk membuktikan ucapannya Korea Selatan menyumbang sebanyak 150.000 ton beras untuk Korea Utara yang sedang mengalami krisis pangan. Bantuan tersebut merupakan pertama kalinya bagi Korea Selatan mengirimkan bantuan secara langsung untuk Korea Utara.

Berakhirnya masa pemerintahan Kim Yong Sam dan dilantiknya Kim Dae Jung sebagai presiden baru pada tahun 1998 menjadi awal yang baru bagi hubungan kedua Korea. Kim Dae Jung yang dikenal sebagai sosok yang memiliki reputasi sangat baik di luar negeri terutama Jepang dan Amerika Serikat karena pro terhadap demokrasi dan anti otoriter. Setelah menjadi presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung percaya bahwa ia dapat mendapatkan kepercayaan dari Korea Utara dengan kesabaran dan kebaikan tanpa menghiraukan dinamika politik yang terjadi di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, Kim Dae Jung memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang hanya berfokus pada kebijakan unifikasi Korea secara *de facto*, Kim Dae Jung menyadari bahwa Korea harus mencapai unifikasi secara *de jure* terlebih dahulu melalui rekonsiliasi dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Dasar Pembentukan dan Isi Sunshine Policy

Secara mendalam dalam upacara pelantikannya, Kim Dae Jung mencetuskan ide untuk membentuk *Sunshine Policy* yang berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu; (1) Korea Selatan tidak akan menoleransi segala tindakan provokasi militer dari Korea Utara; (2) Korea Selatan tidak akan melakukan *absorption unification*; (3) Korea Selatan akan mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi antar kedua Korea. Ketiga prinsip tersebut kemudian diperluas kembali oleh Kementrian Unifikasi Korea sebagai enam prinsip unifikasi korea, yaitu; (1) mencapai keamanan nasional dan kerjasama dan rekonsiliasi antar Korea secara bersama-sama; (2) mewujudkan kehidupan dan pertukaran antar Korea dengan damai; (3) menciptakan sebuah lingkungan untuk perubahan Korea Utara; (4) mencapai kebaikan bersama; (5) mendapatkan dukungan internasional atas *Sunshine Policy*; (6) dan mewujudkan consensus nasional bersama Korea Utara.

Sunshine Policy mengakar pada konsep rekonsiliasi, perdamaian, dan kerjasama antar kedua Korea. *Sunshine Policy* sendiri bertujuan untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan konfrontasi antara kedua Korea dengan rekonsiliasi, sekaligus menghilangkan ketegangan di Semenanjung Korea agar tercipta perdamaian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kim Dae Jung kemudian memilih sebuah pendekatan komprehensif yang bertajuk *Sunshine Policy*. Pemerintahan Kim Dae Jung menggunakan istilah kebijakan terhadap Korea Selatan daripada kebijakan unifikasi yang mana telah digunakan oleh pemerintahan sebelumnya. Penggunaan istilah ini dimengerti sebagai suatu proses yang mana kedua Korea berusaha untuk meningkatkan hubungan mereka melalui rekonsiliasi, kerjasama dan perdamaian yang mana pada akhirnya mencapai unifikasi secara teritorial.

Prinsip dasar dari *Sunshine Policy* adalah perluasan pertukaran ekonomi akan menciptakan atmosfer yang lebih positif terhadap hubungan kedua Korea. Korea Selatan menganggap Korea Utara juga lebih mudah didekati dari sisi ekonomi daripada politik dan keamanan, mengingat bahwa pemerintah Korea Utara sangat membutuhkan bantuan ekonomi dan pangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kang In Duk, Menteri dari Kementerian Unifikasi Korea:

"If South Koreans are to improve inter-Korean relations and, eventually, create a national community in which such universal values as democracy and the principles of market economy are respected, the North must change. For this reason, we will continue to promote economic cooperation with the North under the principle of separating politics from economic cooperation."

Selanjutnya, prinsip dasar lainnya dari *Sunshine Policy* adalah *reciprocity*. Sejak awal, pemerintahan Kim Dae Jung mendefinisikan term tersebut sebagai hubungan timbal-balik antara kedua korea. Baik Korea Selatan maupun Korea Utara, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan cara menghormati satu sama lain dan mendapatkan sesuatu dari berbagai interaksi.

Dengan prinsip dasar *Sunshine Policy* yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan Kim Dae Jung kemudian membuat lima kunci aktivitas dari *Sunshine Policy*; (1) Usaha untuk memulai kembali hubungan komunikasi yang sempat terputus sangat lama antara anggota pemerintah dari kedua Korea; (2) memicu usaha dari Korea Selatan sendiri, misalnya dengan menghimbau para pebisnis Korea Selatan untuk melakukan ekspansi bisnis sampai ke Korea Utara, meningkatkan perizinan investasi ke Korea Utara, sampai membuat perjanjian dengan Korea Utara untuk menghindari penarikkan pajak yang berlebihan dan adanya garansi terhadap investasi yang mana sangat penting terhadap keberlangsungan interaksi ekonomi kedua Korea; (3) fokus terhadap pertemuan kembali antara keluarga –keluarga yang terpisah akibat Perang Korea. Hal ini menjadi prioritas utama dari *Sunshine Policy*; (4) Memberikan bantuan makanan dan kemanusiaan untuk Korea Utara. Bantuan makanan merupakan representasi dari kekuatan Korea Selatan yang sangat diandalkan untuk menjaga Korea Utara tetap berkerja sama dalam *Sunshine Policy*. Menyadari akan hal tersebut, sejak awal pemerintahan Kim Dae Jung telah mengirimkan bantuan pangan melalui organisasi-organisasi internasional dan pemerintah secara langsung. Selain makanan, Korea Selatan juga mengirimkan pupuk, bibit, pestisida, untuk meningkatkan produksi pertanian Korea Utara. Korea Utara juga dibantu melalui pengiriman obat-obatan untuk mengobati penyakit epidemik yang menyebabkan penduduk Korea Utara mengalami malnutrisi . Korea Selatan juga menghimbau pihak swasta dan organisasi sipil untuk menyediakan tambahan bantuan pangan, bibit, pupuk, samapi kemanusiaan; (5) memicu kerjasama internasional untuk mengurangi ketegangan dan menjaga perdamaian di Semenanjung Korea.

Sunshine Policy pada Masa Pemerintahan Kim Dae Jung

Setelah disahkan pada tahun 1998, *Sunshine Policy* segera diimplementasikan oleh Korea Selatan. Dimulai dengan pertemuan diplomatik antara Kim Dae Jung dan Kim Jong Il di Pyongyang, Korea Utara, kemudian berlanjut ke proyek-proyek bilateral lainnya. Melalui proyek-proyek ini lah, akhirnya Korea Selatan dan Korea Utara dapat menyambung dialog yang sempat terputus sejak Perang Korea. Di bawah pemerintahan Kim Dae Jung, hubungan kedua Korea memasuki

awal baru yang dinilai sangat potensial membuka jalan dalam proses unifikasi. Kim Dae Jung sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, tentunya tak lama setelah *Sunshine Policy* dicetuskan, Kim Dae Jung segera menemui Kim Jong Il secara langsung di ibukota Korea Utara, Pyongyang pada tahun 2000. Pertemuan tersebut kemudian menjadi pintu pembuka bagi hubungan bilateral kedua Korea.

Kim Dae Jung percaya bahwa ia dapat memperoleh kepercayaan Korea Utara dengan kesabaran dan kebaikan tanpa menghiraukan dinamika politik yang terjadi di Semenanjung Korea. Presiden Kim Dae Jung berhasil mengadakan pertemuan dengan Kim Jong Il pada tahun 2000 di Pyongyang dan menghasilkan sebuah Joint-Declaration yang dipercaya dapat mengubah hubungan antar Korea secara signifikan. Terdapat lima poin yang menjadi isi deklarasi, antara lain; (1) Korea Utara dan Korea Selatan telah setuju untuk menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan unifikasi dengan cara dan inisiatif masing-masing; (2) menyadari bahwa terdapat elemen bersama dari proposal rencana reunifikasi baik yang dicanangkan oleh Korea Selatan maupun Korea Utara; (3) Kedua Korea menyetujui bahwa penyelesaian isu kemanusian akan dilakukan secara tepat; (4) Korea Utara dan Korea Selatan setuju untuk mempererat kepercayaan dengan mempromosikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama ekonomi dan mendorong pertukaran di bidang lainnya seperti budaya dan olahraga; (5) Kedua Korea menyetujui pengadaan komunikasi dan dialog antar pejabat negara dan wewenang terkait dalam rangka untuk mengimplementasi persetujuan-persetujan sebelumnya.

Pengaruh karakter Kim Dae Jung sangat besar terhadap implementasi *Sunshine Policy*. Sunshine yang seharusnya diimplementasi sesuai dengan prinsip-prisip yang berlaku, justru menerima kritik yang pedas karena keputusan-keputusan fatal yang diambil oleh Kim Dae Jung. Kim Dae Jung telah membuktikan sosoknya yang pro demokrasi dan anti otoriter dengan membentuk. *Sunshine Policy*. Pembentukan *Sunshine Policy* sendiri juga merupakan cermin dari kepercayaan kepada Korea Utara yang dirasa akan dapat melunak karena *Sunshine Policy*.

Namun, kenyataannya Kim Dae Jung membayar sejumlah uang yang cukup besar kepada Kim Jong Il, pemimpin Korea Utara supaya Korea Utara mau menerima Korea Selatan dalam rangka Summit 2000. Pembayaran uang tunai tersebut merupakan langkah fatal yang diambil oleh Kim Dae Jung karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera di dalam *Sunshine Policy*. Hal tersebut kemudian membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan untuk Korea Utara disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh Korea Utara. Tak cukup sampai disitu, setelah

pembayaran uang tunai tersebut Korea Utara membeli material dalam jumlah besar yang digunakan untuk membangun uranium.

Sebagai sosok yang dikenal pencinta damai, tentu implementasi *Sunshine Policy* pada masa pemerintahannya fokus pada kestabilan perdamaian di Semenanjung Korea, yaitu penempatan tentara Amerika Serikat di DMZ yang mana selama ini dinilai sangat konfrotatif oleh Korea Utara, sehingga pada Summit 2000, Korea Utara meminta Korea Selatan untuk menarik pasukan Amerika Serikat sebagai langkah awal dari unifikasi. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Kim Dae Jung.

Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik Kim Dae Jung sebagai sosok yang pro demokrasi dan peace seeker membawa implementasi *Sunshine Policy* timpang dengan apa yang telah direncakan dan dijanjikan. Namun tak dapat dilupakan, bahwa *Sunshine Policy* berhasil membuat kedua Korea menjalin hubungan yang sempat terputus selama lebih dari setengah abad. Disisi lain, Kim Dae Jung berhasil mencoba untuk memperbaiki hubungan yang sempat terputus dengan Korea Utara. Niat baik tersebut kemudian juga membuktikan bahwa Kim Dae Jung memiliki karakter yang mana membawa pengaruh yang besar pula terhadap implementasi dari *Sunshine Policy*.

Sunshine Policy pada Masa Pemerintahan Roh Moo Hyun

Roh Moo Hyun lahir pada tanggal 6 Agustus 1946 di Gimhae, Korea Selatan. Roh Moo Hyun berasal dari keluarga miskin sehingga ia tidak memiliki gelar pendidikan apapun namun Roo Moo Hyun dapat mengikuti sekolah hukum dan akhirnya menjadi pengacara.. Berbekal keahliannya sebagai seorang pengacara, Roh Moo Hyun meniti karir di dunia politik sampai akhirnya berhasil menjadi presiden Korea Selatan yang kesembilan.

Roh Moo Hyun memasuki dunia politik mulai tahun 1988 yaitu pada saat ia bergabung dengan Partai Reunifikasi Demokrat. Pada tahun yang sama, Roh Moo Hyun terpilih menjadi salah satu anggota oleh Dewan Perwakilan di Busan. Namun, dua tahun kemudian, Roh Moo Hyun keluar dari partai karena ia menganggap bahwa partainya tidak lagi mendukung gerakan demokrasi. Meskipun keluar dari partai, Roh Moo Hyun berhasil menjadi walikota Busan pada tahun 1995.

Sebelum menjadi calon presiden, Roo Moo Hyun secara konsisten mengkritik Amerika Serikat, dan memberikan pernyataan bahwa ia adalah seorang anti Amerika. Pernyataan tersebut dimanfaatkan untuk menarik simpati dari warga negara Korea Selatan yang ingin Korea

Selatan memiliki hubungan yang setara dengan Amerika Serikat. Bahkan Roh Moo Hyun mengungkapkan bahwa ia akan bersikap netral jika terjadi perang antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Melalui kampanyenya pula, Roo Moo Hyun menyampaikan pandangannya terhadap *Sunshine Policy*, *"for the existence and prosperity of the nation, the Sunshine Policy is absolutely necessary, and thus must be carried on*." Bagi Roh Moo Hyun, kebijakan luar negeri yang dibuat pada masa pemerintahannya harus merupakan bagian dari *Sunshine Policy* dan politik dalam negeri. Sehingga Roh Moo Hyun mencetuskan paradigma baru yaitu "Balancer in Northeast Asia" atau penyeimbang di Asia Timur yang dipercaya sangat berhubungan dengan *Sunshine Policy*.

Sunshine Policy merupakan agenda utama dari pemerintahan Roh Moo Hyun. Roh Moo Hyun sebagai presiden dalam inagurasinya menyatakan bahwa "*We have to change the peninsula into a land that sends out messages of peace that connects the Eurasian landmass with the Pacific Ocean."* Berambisi ingin menjadikan Semenanjung Korea menjadi satu regional yang damai dan tentram, Roh Moo Hyun kemudian merancang *Sunshine Policy* dengan cakupan yang lebih luas yaitu tidak hanya untuk menciptakan perdamaian yang utuh di Semenanjung Korea, namun juga mempromosikan kemakmuran bersama di Asia Timur.

Roh Moo Hyun terus mengutarakan harapannya terhadap kedua Korea untuk segera mengesahkan sebuah perjanjian perdamaian yang dapat menciptakan stabilitas di Semenanjung Korea. Bagi Roh Moo Hyun, unifikasi Korea bukanlah sesuatau yang harus dihindari dalam beberapa dekade kedepan, semakin cepat Korea Selatan membawa Korea Utara keluar dari ketepurukan ekonomi dan infrastruktur, semakin mudah pula aspek-aspek unifikasi dapat tercapai. Roh Moo Hyun mengungkapkan bahwa *"I would not mind the failures of all other policies only if the North Korea policy were successful."* Di bawah pemerintahan Roh Moo Hyun, Korea Selatan menjadi negara yang paling toleran terhadap Korea Utara, dapat dikatakan hamper setara dengan negara aliansinya, Tiongkok.

Dalam pidatoya di Korea Air Force Akademi pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Roh Moo Hyun mengungkapkan *"South Korea will not allow U.S. troops in Korea to become involved in any dispute in Northeast Asia without the consent of the South Korean government. Our people will not get entangled in regional disputes against our will in the future. We will go ahead with this as a firm principle. The power equation in Northeast Asia will change depending on the choices we*

make". Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai Roh Moo Hyun Doctrine. Doktrin ini dipandang sebagai ungkapan atas keinginan Korea Selatan untuk menjadi aktor yang independen terlepas dari campur tangan Amerika Serikat agar dapat lebih membuka hubungan yang lebih luas dan kooperatif dengan Korea Utara.

Menanggapi doktrin tersebut, Richard Lawless, wakil dari sekretariat pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan pernyataan yang tegas kepada Duta Besar Korea Selatan : "*Korea's Northeast Asian balancer role is a concept that cannot coexist with the Korea-U.S. alliance. If you would like to change the alliance, say so anytime. We will do as you like."* Memang tidak bisa disangkal bahwa kepentingan nasional Korea Selatan sangat bergantung pada hubungan mereka dengan negara-negara besar lainnya. Tak hanya dengan Amerika Serikat, namun juga Jepang dan Tiongkok, yang mana berpengaruh sangat krusial terhadap hubungan antar Korea.

Karakteristik Roh Moo Hyun yang anti-Amerika membuat implementasi *Sunshine Policy* pada masa pemerintahannya benar-benar mencapai puncaknya. Kepercayaan Presiden Roh Moo Hyun terhadap Korea Utara begitu besar sehingga Korea Selatan memberikan implementasi terbaik untuk Korea Utara. Sejak pemerintahan Korea Selatan diambil alih oleh Roh Moo Hyun, tercatat bahwa komunikasi dan dialog antar kedua Korea semakin meningkat; sebanyak 56 pertemuan diselenggarakan sampai akhir 2004 dan 44 perjanjian telah ditandatangani. Di bawah pemerintahaan Roh Moh Hyun juga, pertemuan pemimpin kedua Korea berhasil diselenggarakan di Pyongyang pada tahun 2007.

Pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun inilah, proyek utama dari *Sunshine Policy* mulai dijalankan. Dibukanya Kawasan Industri Kaesong pada tahun 2004 menjadi pertanda hubungan ekonomi antara kedua Korea. Selain itu, peresmian kawasan Gunung Kumgang pada tahun 2003 juga meningkatkan angka lalu lintas penduduk antar kedua Korea. Kedua Korea berhasil mengadakan kerjasama di bidang pariwisata dengan membuka kawasan wisata gunung Kunggam yang merupakan salah satu objek wisata di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Di area Gunung Kumgang, terdapat sebuat resort wisata yang dibangun oleh Hyundai, dan dioperasikan oleh staf yang berasal dari Korea Utara. Pemerintahan Roh Moo Hyun percaya bahwa aktivitas perdagangan yang bersifat internal di sektor manufaktur dapat berkontribusi dalam perkembangan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara di bidang bisnis dan memungkinkan dapat mengurangi ketegangan militer dan politik. Korea Selatan berharap bahwa zona industri akan menjadi *win-win solution* untuk meyakinan Korea Utara bahwa bisnis merupakan langkah yang baik daripada militer. Akhirnya pada tahun 2004, Kawasan Industri Kaesong selesai dibangun secara menyeluruh.

Dan empat dari lima belas perusahaan Korea Selatan telah melakukan produksi langsung di sana, sedangkan sisanya masih dalam tahap pembangungan pabrik. Di akhir tahun 2006, sekitar 300 perusahaan mulai pindah dan berproduksi. Lebih dari 2000 perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Industri Kaesong. Secara keseluruhan, Korea Utara mendapatkan sekitar 2 milyar per tahun atau 12% dari produk nasional bruto pada tahun 2003.

Proyek ketiga adalah penyambungan kembali jalur kereta api dari Seoul-Shinuju yang mana menghubungkan lintasan dari stasiun Dorasan ke Stasiun Kaesong. Jalur kereta api lintas batas yang dibuka pada tahun 2004 ini kemudian juga diikuti oleh pembangunan jalan tol yang menghubungkan jalur Jeojin dan Onjin. Jalur ini menjadi jalur strategis yang digunakan oleh para pekerja Korea Selatan untuk pergi ke Komplek Industri Kaesong yang terletak di Korea Utara, selain itu juga digunakan oleh para turis yang ingin berwisata ke Gunung Kunggam. Wisata Gunung Kumgang ini berhasil menarik perhatian turis dari Korea Selatan sebanyak 1,2 juta sejak dibuka pada tahun 2003.

Selain ketiga proyek yang telah disebutkan, bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara juga menjadi agenda utama bagi pemerintahan Roh Moo Hyun. Selama pemerintahannya, Korea Selatan telah memberikan bantuan yang sangat besar untuk Korea Utara; tercatat dalam tabel dibawah bahwa pada tahun sejak tahun 2003-2008, bantuan yang diberikan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun. Hal ini semakin membuktikan bahwa pada periode ini Korea Selatan memberikan kepercayaan yang besar kepada Korea Utara. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Korea Selatan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan internasional dan *sense of brotherhood* sesama Korea. Dengan menyediakan bantuan, diharapkan rakyat Korea Utara menyadari pula rasa persaudaran dengan meringankan penderitaan mereka.

Pemerintah Korea Selatan percaya bahwa dengan mengirimkan bantuan pupuk, bibit, dan pestisida akan meningkatkan produksi pertanian Korea Utara sehingga dapat mengurangi krisis pangan sekaligus memperbaiki transparansi distribusi pangan ke penduduk. Pada tahun 2004, Korea Selatan mengirimkan bantuan sebanyak 300.000 ton pupuk ke Korea Utara, sejak saat itu Korea Utara terus meminta bantuan dari Korea Selatan baik secara langsung maupun melalui organisasi internasional seperti pada tahun 2003, Korea Selatan memberikan bantuan obat-obatan melalui WHO dan juga makanan melalui World Food Programme. Selain pemerintah, Korea Utara juga menerima bantuan dari pihak-pihak swasta.

Sunshine Policy dibawah Roh Moo Hyun menuai kritikan pedas dari berbagai aspek. Tujuan *Sunshine Policy* dianggap terlalu ambisius dan terlalu idealis. Pemerintahan Roh Moo Hyun juga dinilai lebih retorik dan amatir dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan implementasinya. Roh Moo Hyun sendiri dapat dikatakan kurang memahami hal-hal yang terkait dengan isu luar negeri. Roh Moo Hyun cenderung mengabaikan agensi-agensi pemerintahan dan memusatkan kewenangan terhadap kebijakan luar negeri kepada *National Security Council.* Pimpinan *National Security Council*, Lee Jung Soek memegang kewenangan penuh atas kebijakan nasional diatas Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Namun, dalam kinerjanya Lee Jung Soek mengabaikan isu keamanan dan pertahanan sehingga kebijakan-kebijakan luar negeri yang diputuskan seringkali tidak strategis.

Di bawah pemerintahan Roh Moh Hyun sangat terlihat jelas bahwa rekonsiliasi hubungan antar kedua Korea melalui kerjasama ekonomi menjadi prioritas utama. Dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Roh Moh Hyun merupakan periode puncak dari *Sunshine Policy*. Hal tersebut terlihat dari hubungan baik Roh Moh Hyun dengan Kim Jong Il sebagaimana Roh Moh Hyun mengungkapkan dalam sebuah wawancara setelah Roh Moh Hyun melakukan pertemuan dengan Kim Jong Il di Pyongyang pada tahun 2007, *"North Korean leader Kim Jong-il is someone who is open to communication. Kim is the person I felt was the most flexible in North Korea, while the other officials seemed very rigid."*

Sehingga terlihat bahwa Roh Moo Hyun menaruh kepercayaan terhadap Korea Utara, yang mana hal tersebut melalui karakteristiknya yang anti Amerika. Implementasi dari *Sunshine Policy* juga menjadi timpang karena minimnya timbal-balik dari Korea Utara yang mana dibuktikan dengan Korea Utara yang masih membangun kekuatan nuklirnya padahal Korea Selatan telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada Korea Utara, sehingga dengan hubungan yang asimetris tersebut, dapat dikatakan bahwa Korea Utara telah mengeksploitasi Korea Selatan melalui *Sunshine Policy*. Harapan dari *Sunshine Policy* bahwa Korea Utara akan melunak tidak terbukti pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun ini. Kepercayaan yang diberikan untuk Korea Utara justru dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk terus meminta bantuan kemanusiaan dari Korea Selatan. Hal tersebut semakin membawa *Sunshine Policy* ke arah yang tidak simetris sekaligus tidak menguntungkan bagi Korea Selatan.

Meskipun Roh Moo Hyun menaruh kepercayaan yang besar terhadap Korea Utara, Roh Moo Hyun tetap menunjukkan karakternya sebagai sosok yang membela hak asasi manusia. Latar belakang karirnya yang

mana Roh Moo Hyun pernah menjadi pengacara hak asasi manusia membuat implementasi dari *Sunshine Policy* juga berfokus pada pengungsi. Roh Moo Hyun mengambil keputusan besar pada saat menerima pengungsi Korea Utara dari Vietnam pada tahun 2004. Namun, keputusan justru membuat Korea Utara marah dan sempat memutuskan bentuk dialog dan komunikasi dengan Korea Selatan.

Di akhir masa jabatannya sebagai, Roh Moo Hyun berhasil mengadakan Summit 2007 di Pyongyang. Summit 2007 berfokus pada proyek pembangunan ekonomi kedua Korea, seperti pembentukan West Sea Economic Center di pelabuhan Haeju, Korea Utara. Namun, pemerintah Korea Selatan selajutnya tidak mengimplementasi proyek tersebut.. Pengganti Roh Moo Hyun, Lee Myung Bak memiliki pandangan yang sangat kontras dengan *Sunshine Policy* sehingga *Sunshine Policy* yang telah menuai terlalu banyak kritik dan diragukan posisinya sebagai engangement policy menjadi semakin menemui jalan buntu dalam implementasinya.

Sunshine Policy pada Masa Pemerintahan Lee Myung Bak

Dibandingkan dengan kedua presiden sebelumnya, Lee Myung Bak berasal dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan politik yang sangat berbeda. Lee Myung Bak lahir di Osaka, Jepang oleh karena itu ia hidup di Jepang . Pada tahun 1945, keluarga Lee Myung Bak kembali ke Korea Selatan. Datang dari keluarga yang mampu, Lee Myung Bak berhasil menempuh pendidikan sampai tingkat universitas di Universitas Korea. Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah inilah, ketertarikan Lee Myung Bak terhadap politik mulai terlihat. Pada tahun 1964, Lee Myung Bak memimpin aksi demonstrasi menentang kepemimpinan presiden Park Chung Hee. Akibat aksi tersebut, Lee Myung Bak dipenjara selama tiga bulan atas tuduhan menyebabka keributan di muka umum.

Setelah lulus dari Universitas Korea pada tahun 1965, Lee Myung Bak bekerja di Hyundai Construction. Karena kerja keras dan kemahirannya, karir Lee Myung Bak terus menanjak naik. Lee Myung Bak ditunjuk menjadi direktur perusahaan hanya dalam jangka lima tahun setelah ia bergabung dengan Hyundai. Pada tahun 1988, Lee Myung Bak berhasil menjadi chairman dari Hyundai Constructions. Namun, setelah 27 tahun berkarir di Hyundai, Lee Myung Bak memutuskan untuk berhenti karena ingin memulai karir di dunia politik.

Pada tahun 1992, Lee Myung Bak bergabung dengan Partai Liberal Demokrat. Enam tahun kemudian, ia mencalonkan diri sebagai

presiden. Namun, pencalonan Lee Myung Bak terganjal oleh skandal dana kampanye yang mana menyebabkan ia mengundurkan diri sebagai calon. Setelah gagal menjadi presiden, Lee Myung Bak terpilih menjadi walikota Seoul. Pada tahun 2002 Selama menjabat sebagai walikota Seoul, Lee Myung Bak terus membuat proyek-proyek kota yang ramah lingkungan. Puncaknya, Lee Myung Bak dianugerahi sebagai Hero of the Environment oleh Time Magazine pada tahun 2007.

Prestasinya di bidang politik dan lingkungan tersebut membuat Lee Myung Bak percaya diri untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Pada bulan Desember 2007, Lee Myung Bak memenangkan pemilihan dan akhirnya resmi pindah ke Blue House tahun 2008. Di masa pemerintahan Lee Myung Bak, Korea Selatan seperti manata kembali hubungan dengan negara-negara lain terutama Korea Utara dan Amerika Serikat. Lee Myung Bak berjanji akan memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan menerapkan kebijakan yang lebih keras terhadap Korea Utara, yang mana kemudian dikenal sebagai MB Doctrine.

Lee Myung Bak mengungkapkan bahwa proyek-proyek kerjasama ekonomi antar Korea akan mencakup empat prinsip yaitu denuklirisasi, kebutuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya, dan konsensus nasional. Keempat prinsip tersebut sangat kontras dengan *Sunshine Policy* yang mana selalu mempromosikan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan sehingga dapat membantu pemulihan krisis ekonomi di Korea Utara. Lee Myung Bak menilai bahwa konsep *reciprocity* (timbal balik) yang diusung oleh *Sunshine Policy* tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Sunshine Policy* bersifat asimetris karena Korea Selatan terus memberi bantuan tanpa adanya timbal balik dari Korea Utara. Oleh karena, Lee Myung Bak ingin membawa hubungan antar Korea menjadi simetris

Dalam upacara pelantikannya, Lee Myung Bak secara tegas mengungkapkan bahwa denuklirisasi Korea Utara dan *mutual respect* merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan di Semenanjung Korea. Lebih lanjut, Lee Myung Bak mengungkapkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan antar Korea menjadi lebih produtif. Oleh karena itu, Lee Myung Bak mencetus tiga prinsip yang digunakan dalam kebijakan barunya, yaitu; (1) meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dan tidak lagi memberikan bantuan sepihak untuk Korea Utara; (2) Denukrisasi Korea Utara dalam rangka menciptakan struktur perdamaian yang baru di Semenanjung Korea; (3) isu-isu kemanusiaan harus segera diselesaikan demi menjamin kesejahteraan hidup penduduk kedua Korea.

Setelah terpilih menjadi presiden pada tahun 2008, Lee Myung Bak segera menghentikan semua bentuk pengiriman bantuan ke Korea Utara. Lee Myung Bak secara tegas menyatakan bahwa Korea Utara harus menghentikan pengembangan nuklir sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang selama ini dikirim. Lee Myung Bak mengungkapkan bahwa *Sunshine Policy* tidak dapat mengubah perilaku Korea Utara dan justru memperkuat rezim komunis di sana. Lee Myung Bak menggunakan *hard line policy* kepada Korea Utara, terutama setelah Korea Selatan mengaktifkan kembali program nuklir dan uji coba misil pada tahun 2009 dan 2012.

Karena *Sunshine Policy* dianggap tidak efektif dalam meningkatkan hubungan kedua Korea, terutama dalam menghadapi sikap Korea Utara terhadap pembangunan nuklir. Maka pemerintahan Lee Myung Bak mengulas *Sunshine Policy*, dan hasil dari ulasan tersebut, *Sunshine Policy* dinyatakan gagal dan tidak lagi digunakan sebagai kebijakan luar negeri terhadap Korea Selatan sejak tahun 2010. Sejak saat itu, Korea Selatan menggunakan strategi kebijakan baru yang bertajuk Vision 3000: Denuclearization and Openness selama pemerintahan Lee Myung Bak periode tahun 2008 -2013.

Kesimpulan

Alasan Korea Selatan menghentikan *Sunshine Policy* Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Unifikasi Korea terhadap *Sunshine Policy* telah menjadi pernyataan resmi bahwa *Sunshine Policy* tidak lagi dipakai dan dinyatakan gagal oleh pemerintah Korea Selatan. *Sunshine Policy* dianggap tidak dapat menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan Korea Utara terkait dengan isu nuklir, politik, dan hak asasi manusia. *Sunshine Policy* juga tidak dapat menekan Korea Utara untuk mengubah pandangan Korea. Dibawah *Sunshine Policy*, Korea Utara tetap mengembangkan kekuatan militernya yang terbukti insiden torpedo kapal Chonan pada tahun 2010.

Implementasi dari *Sunshine Policy* telah menunjukkan penurunan sejak masa pemerintahan Roh Moo Hyun karena rentan terhadap eksploitasi, namun disisi lain *Sunshine Policy* juga mencapai puncaknya. Progres dari *Sunshine Policy* menemui masa kritis pada saat pemerintahan Lee Myung Bak. Lee Myung Bak yang merupakan sosok pragmatis, tentu merasa sanksi terhadap Korea Utara karena tak kunjung melakukan denuklirisasi padahal *Sunshine Policy* telah hampir satu dekade diimplementasikan oleh Korea Selatan. Hal inilah kemudian yang

membuat Lee Myung Bak menaruh ketidakpercayaan terhadap Korea Utara.

Melihat hal tersebut, merupakan hal wajar jika Lee Myung Bak segera mengganti *Sunshine Policy* dengan kebijakan baru yang berfokus pada denuklirisasi. Rasa ketidakpercayaan yang ditujukan untuk Korea Utara selain berdasarkan pada penilaiannya terhadap implementasi dari *Sunshine Policy* namun juga berdasarkan pada karakter pribadinya yang sangat pragmatis dan menjunjung tinggi nilai ideologi kuat yang mana berbeda sekali dengan presiden sebelumnya, Roh Moo Hyun.

Ketidakpercayaan tersebut kemudian membuat Korea Utara melakukan tindakan-tindakan provokatif yang mana mengabaikan implemenatasi dari *Sunshine Policy*. Penembakan di kawasan gunung Kumgang dan insiden Chonan menjadi pukulan yang keras bagi Korea Selatan yang masih bersikap lunak terhadap Korea Utara. Pasca kedua peristiwa tersebut, tentu sebagai sosok yang pragmatis Lee Myung Bak segera mengambil langkah tegas yang mana menjadikan Korea Selatan menutup semua akses hubungan terhadap Korea Selatan, dengan kata lain *Sunshine Policy* berhenti diimplementasikan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Moon Chung In, "The Kim Dae Jung Government's Peace Policy Toward North Korea", Asian Perspective Vol. 25, No. 2 (Winter 2002)

Kim Keun Sik, "Inter Korean Relation and the Future of the Sunshine Policy", The Journal of East Asia Affairs Vol. (Spring 2002)

Lee Sung Yoon, "Engaging North Korea: The Clouded Legacy of South Korea's Sunshine Policy", American Enterprise Institute for Public Research, (Spring 2010)

Paik Hak Soon. "Assessment Of The Sunshine Policy: A Korean Perspective", Asian Perspective Vol. 26, No. 3 (2003)

Kim Hong Nack, "South-North Korean Relations Under The Roh Moo-Hyun Government" International Journal of Korean Studies Vol. X, No. 1 (2006): 39-40

Kim Hee Nim dan Choi Jun Y, "Uncertainty in Foreign Policy Making: A Bayesian Game Analysis of Korea", (Florida: Florida State Univerity, 2003)

Kim Choong Nam, "The Roh Moo Hyun's Government Policy Towards North Korea " East-West Center No. 5 2005, 12

Kim Hong Nack, "South-North Korean Relations Under The Roh Moo-Hyun Government" International Journal of Korean Studies Vol. X, No. 1 (2006)

Kirkpatrick, Melanie, "Escape from North Korea: The Untold Story of Asia's Underground Railroad", Encounter Books, (2013)

Park Jong Chung, "Lee Myung Bak Administration's North Kora Policy: Challenges and Takes", The Journal of East Asian Affairs, vol 22, no 2, (2008)

Welch, David A, "Trust and Mistrust in International Relations by Andrew H. Kydd",The International History Review Vol. 28, No.3 (2006)

SUMBER INTERNET:

BBC. "Profile: Lee Myung Bak", http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7150162.stm (diakses pada 5 Oktober 2014

BBC. "Obituary: Roh Moo-hyun", http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2535143.stm (diakses pada 7 Oktober 2014)

Gale, Alastair. "Pyongyang Threatens to End Venture", http://www.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323550604578410010892971052?mg=reno64wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424127887323550604578410010892971052.html (diakses pada 20 Oktober 2014)

CNN. "Kim Dae-jung: Dedicated to reconciliation", https://web.archive.org/web/20060922050400/http://archives.cnn.com/2001/WORLD/asiapcf/east/06/12/bio.kim.daejung/ (diakses pada 1 Oktober 2014)

Choe Hang Sun, "Kim Dae Jung", The New York Times, 2009 (diakses pada 1 Oktober 2014) http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/_kim_dae_jung/index.html (diakses pada 1 Oktober 2014)

CNN. "South Korea: Policy of engagement with North is a failure", http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/11/19/south.korea.sunshine.policy/ (diakses pada 26 September 2014)

Chosun Media. "Roh Regretted 'Big Mistake' of His Presidency", http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2009/09/22/2009092200718.html (diakses pada 23 September 2014)

History, "Armistice ends the Korean War", (http://www.history.com/this-day-in-history/armistice-ends-the-korean-war) (diakses pada 20 Oktober 2010)

Kydd, Andrew H. "Trust and Mistrust in International Relations" , Princenton University Press, 2010, http://press.princeton.edu/chapters/s8091.html (Diakses pada 15 Juli 2014)

Oxford Dictionaries, "Characteristic." , http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/characteristicl?q=characteristic (diakses 1 September 2014)

Oxford Dictionaries," Leader", ," http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/leaderl?q=leader (diakses 1 September 2014)
Oxford Dictionaries, "Exploitation", http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/exploitationl?q=exploitation (diakses 1 September 2014)
Popeski, Ronald. "Sunshine Policy failed to change North Korea: report", Reuters, 2010, http://www.reuters.com/article/2010/11/18/us-korea-north-sunshine-idUSTRE6AH12520101118 (diakses pada 15 Juli 2014)
San Sin Swe, "What Happened To North Korea the Sunshine Policy", http://ivn.us/2013/04/20/what-happened-to-north-korea-the-sunshine-policy/ (diakses pada 15 Juli 2014)
The National Committee on North Korea. " An Overview of Inter-Korean Relations". http://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/an-overview-of-south-korea2019s-dprk-policy (diakses pada 15 Juli 2014)
Peterson Institute for International Economics. "South Korean Public Opinion on Aid to North", Koreapiie.com/nk/?p=8231 (diakses pada 15 Juli 2014)
Princeton. "Exploitation", https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Exploitation.html (diakses 1 September 2014
Nobel Prize, "Kim Dae Jung, Biographical" http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2000/dae-jung-bio.html (diakses pada 1 Oktober 2014)
The Biography. "Roh Moo-hyun", http://www.biography.com/people/roh-moo-hyun-37092 (diakses pada7 Oktober 2014)
NCRK. "An Overview of South Korea", http://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/an-overview-of-south-korea2019s-dprk-policy (diakses pada 15 Juli 2014)
Klingner, Bruce, "The tortuous North Korean refugee triangle", http://www.atimes.com/atimes/Korea/FI22Dg01.html, (diakses pada 20 Oktober 2014)
North Korea Economy Watch. "South Korean tourist fatally shot at Kumgang", http://www.nkeconwatch.com/2008/07/21/south-korean-tourist-fatally-shot-at-kumgang/ (diakses pada 20 Oktober 2014)
Smallwood, Stuart" The Cheonan Incident and the Continued International Isolation of North Korea", http://www.globalresearch.ca/the-cheonan-incident-and-the-continued-international-isolation-of-north-korea/32075, (diakses pada 21 Oktober 2014)

Walsh, Bryan. "Lee Myung Bak", Time , http://content.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1663317_1663319_1669884,00.html (diakses pada 5 Desember 2014)

DOKUMEN PEMERINTAHAN:
Kementrian Unifikasi Korea Selatan, Buku Putih, 2001
Kementrian Unifikasi Korea Selatan, Buku Putih, 2005
Kementrian Unifikasi Korea Selatan, Buku Putih, 2010